

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan yang masih besar menjadi tantangan pembangunan yang di hadapi Indonesia. Persoalan kemiskinan menjadi persoalan yang serius karena konsekuensi yang ditimbulkannya. Kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan juga mengakibatkan jutaan anak-anak tidak bias memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan rakyat untuk membiayai layanan kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses layanan public, kurangnya lapangan kerja, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, serta menguatnya arus migrasi ke kota (Andhykha, 2018)

Pertumbuhan penduduk merupakan alah satu faktor penting untuk memberantaskan kemiskinan, karena pertumbuhan merupakan suatu gambaran adanya perkembangan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu faktor suatu bangsa untuk memajukan bangsanya atau menaikkan kesejahteraan bangsanya. Perekonomian bisa dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari padayang dicapai pada masa sebelumnya.

Ketika perekonomian suatu Negara mengalami peningkatan berarti terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sebaliknya ketika perekonomian itu tidak berkembang maka terjadinya permasalahan perekonomian dan sosial (Kuncoro, 2015)

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Akan tetapi pemerataan pembangunan masih belum merata di setiap kabupaten di Sumatera Barat, masih banyak ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki. Usaha dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari akar permasalahannya yang terjadi di suatu daerah, salah satunya adalah ketenagakerjaan yang perlu penanganan serius yaitu kualitas kerja yang masih relatif rendah, permasalahan upah atau pendapatan tenaga kerja yang masih rendah serta masih terjadinya ketimpangan sektoral tenaga kerja (Kuncoro, 2015).

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Masyarakat Kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2015-2019 (Satuan Orang)**

Tahun	Kemiskinan
2015	37.960
2016	37.155
2017	36.451
2018	35.727
2019	34.822

*Sumber: Badan Pusat Statistic (BPS) 2019*

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat terjadi penurunan jumlah kemiskinan di

Provinsi Sumatera Barat. Terlihat pada tahun 2015 jumlah kemiskinan di Sumatera Barat adalah 37.960 orang tersebar pada 19 kabupaten dan kota, pada tahun 2016 jumlah kemiskinan mengalami penurunan menjadi 37.155 orang dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 yang lalu. Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan, jumlah kemiskinan di Sumatera Barat masih tergolong tinggi, oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Barat.

Penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera barat merupakan akumulasi dari semua program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik melalui program pemerintah maupun daerah. Diantaranya : Program Keluarga Harapan (PHK), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta berbagai program pelatihan.

Pertumbuhan penduduk dinilai bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat garis spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari garis spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah. Adanya garis spesialisasi dan pembagian kerja diantara para tenaga kerja akan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, karena adanya garis spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan perkembangan teknologi (Sarafino & Smith, 2014)

Pembangunan ekonomi adalah hasil dari perubahan dalam bidang teknis dan tata kelembagaan dengan mana output tersebut diproduksi dan didistribusikan. Tujuannya untuk mencapai ekonomi yang cukup tinggi, menjaga kestabilan harga, mengatasi masalah psengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata (Mankiw, 2006). Pembangunan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh terhadap *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dan dapat menjadi suatu jembatan dalam realisasi pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat di ukur melalui *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) dan tingkat pertumbuhan ekonominya. PDRB merupakan jumlah nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam waktu tertentu.

Provinsi Sumatera Barat memiliki laju pertumbuhan PDRB yang cukup baik, merupakan 3 tertinggi dari pulau Sumatera. Diberlakukannya otonomi daerah menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/ kota untuk kreatif dalam melaksanakan kebijakannya demi meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka juga akan berdampak positif pada tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Barat sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompertitif dengan produk sekotor jenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar Temanggung (Nenik Woyanti, 2018)

Stabilitas keuangan daerah di Sumatera Barat terjaga didukung oleh masih terjaganya risiko dari sisi korporasi dan rumah tangga. Stabilitas keuangan daerah relatif masih terjaga baik dari korporasi maupun rumah tangga. Kinerja korporasi sedikit tertahan akibat masih lemahnya permintaan masyarakat. Walaupun demikian Sumatera Barat masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik seperti terlihat pada data Product Domestic Regional Bruto Berdasarkan Harga Berlaku yang terlihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Product Domestic Regional Bruto**  
**Menurut Harga Berlaku Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2015 – 2019 (Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>	<b>Growth</b>
2015	179.951.980	-
2016	196.099.176	8.97
2017	213.893.468	9.07
2018	230.367.222	7.70
2019	245.982.644	6.78

Sumber: BPS Sumatera Barat (2021)

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan PDRB Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, peningkatan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2017, dengan peningkatan mencapai 9.07% dari tahun sebelumnya, hingga tahun 2019 terus terjadi peningkatan yaitu mencapai 6.78% dari tahun 2018 yang lalu. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat dan diduga akan mempengaruhi angka kemiskinan di Sumatera Barat.

Pengangguran memang selalu menjadi polemik yang tidak pernah ada habisnyadan sangat berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). masalahketenagakerjaan yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh negara – negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari masalah SDM, yaitu masalah yang berkaitan dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan ketrampilan serta rendahnya tingkat pendayagunaan tenaga kerja(Sihombing, 2014).

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan dimana lapangan pekerjaan merupakan idikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan. dalam hubungannyadengan kualitas SDM, pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkankualitas SDM itu sendiri dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhanekonomi, karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yangbermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern (Elfindri & Bachtiar, 2004).

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Akan tetapi pemerataan pembangunan masih belum merata di setiap kabupaten di Sumatera Barat, masih banyak ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki usaha dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari akar permasalahan yang terjadi disuatu daerah, salah satunya adalah ketenagakerjaan yang perlu penanganan serius yaitu kualitas kerja yang

masih relatif rendah, permasalahan upah atau pendapatan tenaga kerja yang masih rendah serta masih terjadinya ketimpangan sektoral tenaga kerja (Aldino, 2018).

Kecilnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki meningkatkan angka pengangguran di Sumatera Barat, pernyataan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat yang terlihat pada Tabel 1.3 di bawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Jumlah Pengangguran**  
**di Sumatera Barat Tahun 2015-2019**

Tahun	Pengangguran (%)
2015	6,89
2016	5,09
2017	5,58
2018	5,55
2019	5,33

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2019*

Pada tabel 1.3 menjelaskan bahwa jumlah Pengangguran di Sumatera Barat dalam harga konstan 5 tahun terakhir mengalami periode naik turun angka pengangguran, diawali tahun 2015 6,89%, tahun 2016 penurunan sebesar 5,09%, lalu di tahun 2017 naik sebesar 5,58%, kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar 5,55% dan tahun 2019 turun 5,33%. Dengan meningkatnya angka pengangguran di Sumatera Barat diduga akan mendorong meningkatnya angka kemiskinan di provinsi tersebut.

Pendidikan adalah sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari

kemiskinan. Selain itu, pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang dan membutuhkan proses yang cukup lama serta biaya yang sangat besar dalam masa pendidikan yang lebih tinggi

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan, pendidikan yang baik akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka. Untuk melihat seberapa besar kemajuan sektor pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah padacakupan pendidikan usia 19-24 dalam pendidikan perguruan tinggi. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu transfer dana APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menciptakan ketahanan dan pemerataan perekonomian masyarakat antar daerah dengan kebijakan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah daerah (Septiana,2008)

Angka partisipasi sekolah di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia di setiap kabupaten/kota sangat bervariasi. Hal ini salah satunya dikarenakan perbedaan peraturan dibidang pendidikan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (Septiana,2008) Berdasarkan data BPS Sumatera Barat diketahui tingkat partisipasi sekolah (APS) menurut jenjang pendidikan SLTA seperti terlihat pada Tabel 1.4 di bawah ini:



**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Pertumbuhan APS di Sumatera Barat**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	APS (%)
2015	82,53
2016	82,62
2017	82,59
2018	83,08
2019	83,63

*Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS) 2019*

Pada tabel 1.5 menjelaskan angka partisipasi sekolah di Sumatera Barat dalam konstan dari tahun 2015 sebesar 82,53 %, tahun 2016 sebesar 82,62 %, lalu tahun 2017 sebesar 82,59 %, tahun 2018 sebesar 83,08 %, dan tahun 2019 sebesar 83,63 %. Berdasarkan pada uraian data tersebut terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 walaupun sebagian besar masyarakat tersebut beraktifitas sebagai pekerja kasar diruang lingkup wilayah Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah sebesar 42.297,30 km<sup>2</sup>. Penduduknya tidak hanya berasal dari penduduk asli namun juga penduduk pendatang. Penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang dikarenakan Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Jumlah penduduk dapat di pandang sebagai faktor pendukung pembangunan sebab dengan penambahan penduduk berarti juga penambahan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar (Statistik, 2019)

**Tabel 1.5**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk di Sumatera Barat**  
**Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2015	51.962,89
2016	52.595,28
2017	53.214,89
2018	53.820,07
2019	54.411,97

*Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS) 2019*

Pada tabel 1.5 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Sumatera Barat dari tahun 2015 berjumlah 51.962,89 jiwa, lalu pada tahun 2016 berjumlah 52.595,28 jiwa, kemudian tahun 2017 berjumlah 53.214,89 jiwa, tahun 2018 berjumlah 53.820,77 dan tahun 2019 berjumlah 54.411,97 jiwa. Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang lalu, dengan bertambahnya jumlah penduduk diyakini akan sejalan dengan bertambahnya angka kemiskinan di Sumatera Barat.

Berdasarkan paparan dari latar belakang diatas tentang indikator-indikator yang mempengaruhi kemiskinan maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Determinasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari kondisi yang telah dijelaskan pada latar belakang dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti antara lain:

- a. Bagaimana pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Sumatera Barat ?
- b. Bagaimana pengaruh tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Barat ?
- c. Bagaimana pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap kemiskinan di Sumatera Barat ?
- d. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Sumatera Barat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Sumatera Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan uraian rumusan masalah dan tujuan penelitian maka diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Bagi mahasiswa, sebagai acuan dan dapat memahami permasalahan kemiskinan secara benar, sehingga dapat mengatasi permasalahan perekonomian yang ada di Sumatera Barat
2. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan agar dapat memahami hubungan antara Kemiskinan dengan PDRB, Tingkat Pengangguran, Angka Partisipasi Sekolah, dan Jumlah Penduduk.
3. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat member informasi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sehingga dapat menuntaskan permasalahan tersebut.
4. Bagi penulis, untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan selama duduk dibangku perkuliahan, agar dapat mengatasi permasalahan Kemiskinan di Sumatera Barat dan syarat untuk kelulusan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta.